

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- BPKP, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Seokanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Totok Mardiyanto dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, edisi revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahjudin Sumpeno. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panduan Perencanaan Berbasis Perdamaian*. Banda Aceh: The World Bank.

Jurnal dan Artikel

- Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.
- Faridah dan Bambang Suryono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No. 5 (2015).

I Made Adi Artana dkk. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur*. Universitas Udayana.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Artikel – Th. I – No.4 – Juni 2002.

Yusuf Manggala dan Moch. Mustam. 2017. *Analisis Faktor Faktor dalam Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten Semarang*. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*. Vol.6 No. 2 Tahun 2017. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15996/15449>, pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 21.10.

Skripsi

Gilang Sahudi Ekayatna. 2016. *Mekanisme Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015*. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kurnia Ibnu Azhari. 2011. *Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan dalam Program Neighbourhood Development*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Rizky Anggara. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Ekonomi dan Pengelolaan Kawasan Daerah Wisata Leuwi Hejo Desa Karang Tengah Kabupaten Bogor Jawa Barat*. Skripsi Institut Pertanian Bogor.

Internet

Aziz Turindra. 2009. *Pengertian Partisipasi*. Diakses dari <http://turindraatp.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-partisipasi.html>, pada tanggal 8 November 2017.

Bob Susanto. 2016. *14 Pengertian Masyarakat Menurut Para ahli Lengkap*. Diakses dari <http://www.spengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengkap.html>, pada tanggal 7 November 2017.

Mahmuddin Muslim. 2008. *Menanti APBD Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Diakses dari http://mahmuddinmuslim.blogspot.co.id/2008/09/menanti-apbd-berbasis-partisipasi_15.html, pada tanggal 31 Oktober 2017.

Muhammad Ikhwan. 2011. *Teori Partisipasi Publik (Pengertian Partisipasi Publik)*. Diakses dari http://studihukum.blogspot.co.id/2011/01/urgensi-partisipasi-publik-dalam_11.html, pada tanggal 7 November 2017.

Samhis Setiawan. 2016. *Pengertian Nagari Menurut Para Ahli Lengkap*. Diakses dari <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-nagari-menurut-para-ahli-lengkap/>, pada tanggal 8 November 2017.

Bahan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Daerah Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016